



TAP JUMAT: Kebijakan WFH di lingkungan Pemkab Gunungkidul tidak diberlakukan bagi pejabat eselon II, III, dan panewu.

Yankes Tak Tersentuh, Eselon II-III Tetap Ngantor

Skema WFH di Kota Jogja dan Gunungkidul

JOGJA - Pemkot Jogja dipastikan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan *work from home* (WFH). Namun, ada larangan khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) eselon dua dan tiga bekerja dari rumah.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, pegawai dengan tingkatan jabatan eselon tiga ke atas memang dilarang WFH. Lantaran memiliki tanggung jawab besar di bidangnya. Kemudian jabatan di bawahnya diperbolehkan WFH setiap hari Jumat. Kebijakan WFH baru dimulai pekan depan, mengingat hari Jumat ini bertepatan dengan hari libur nasional.

Berdasarkan data di Pemkot Jogja, jumlah pegawai eselon dua dan tiga mencapai 187 orang. Kategori eselon dua (II) B ada 33 orang, eselon tiga (III) A sebanyak 33 orang, dan eselon III B ada 101 orang.

"Eselon dua, eselon tiga ke atas masih masuk seperti biasa. Hanya di bawahnya yang boleh WFH," ujar Hasto saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ, Kamis (2/4).

Selain pegawai eselon dua dan tiga, mantan bupati Kalon Progo itu memastikan sektor pelayanan publik dan pelayanan kesehatan (yankes) atau yang bersinggungan langsung dengan masyarakat juga tidak menerapkan WFH. Misalnya keurahan, kemenran, puskesmas, dinas perhubungan, Satep PJ layanan kependudukan, hingga Mail Pelayanan Publik (MPP).

Hasto menyatakan, pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk penghematan bahan bakar minyak (BBM). Upayanya dengan plafonisasi jatah BBM bagi kendaraan dinas. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan surat edaran.

Siapa plafonisasi akan diterapkan dengan pembatasan jatah BBM kendaraan dinas mobil lima liter per hari. Sementara kendaraan dinas sepeda motor hanya satu liter per hari. Kebijakan ini diterapkan sesuai pelaksanaan WFH atau selama empat hari.

Hasto yakin lewat plafonisasi itu dapat menghemat pengeluaran BBM hingga 40 persen. Adapun pengeluaran BBM di Pemkot Jogja mencapai Rp 10,7 miliar setahun. Jika mampu dikurangi 40 persen maka pengeluaran BBM bisa efisiensi menjadi sekitar Rp 6 miliar per tahun.

Selain itu, Pemkot Jogja nantinya juga akan menggelorakan gerakan moral bagi pegawai untuk menggunakan kendaraan tanpa BBM. Hasto mengaku akan memulai gerakan itu pada kegiatan dinas yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau sepeda. "Injaya ilahisaya bersama sekda bisa kasih contoh, Besok kalau ke sidang paripurna jalan kaki karena dekat," kata Hasto.

Di Kabupaten Gunungkidul, Pemkab mulai mngmatangkan skenario WFH atau WFH sebagai bagian dari langkah efisiensi penggunaan BBM. Namun kebijakan ini dipas-tikan tidak berlaku bagi pejabat struktural hingga layanan publik strategis seperti kesehatan.

Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta mengungkapkan, surat kebijakan dari pemerintah pusat baru diterima, Rabu sore (1/4). Saat ini, Pemkab masih melakukan pemetaan teknis sebelum implementasi.

"Suratnya baru kami terima. Minggu ini masih libur, jadi sekarang kami petakan dulu. Prinsipnya ada dua, yakni transformasi kerja berbasis digital dan semangat efisiensi," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (2/4).

Menurutnya, penerapan WFH akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik. Sejumlah jabatan strategis dipastikan tidak masuk dalam skema itu. Pengecualian akan diterapkan bagi pejabat eselon II, eselon III, dan panewu di 18 kapanewon. (tmu/bas/laz/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005